

BAB II

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut Darrough (1993) pengungkapan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan menjadi pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela.

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang harus dilakukan oleh perusahaan karena telah ditetapkan dalam suatu peraturan atau standar yang berlaku (undang-undang, pajak, SAK, OJK). Sedangkan pengungkapan sukarela

merupakan pengungkapan yang dilakukan atas kemauan sendiri perusahaan tanpa diwajibkan oleh suatu peraturan yang berlaku. Pengungkapan ini bertujuan untuk mengurangi informasi asimetri dalam laporan keuangan yang dapat meminimalisasi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen.

Pengungkapan ini dapat mencakup lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan kerja, produk dan keterlibatan masyarakat umum (Hackson & Milne, 1996).

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu contoh dari pengungkapan sukarela.

Kansal *et al.* (2014) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Tanggung jawab sosial perusahaan juga didefinisikan sebagai suatu proses dalam mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari tindakan ekonomi perusahaan untuk kepentingan kelompok tertentu dalam suatu masyarakat dan untuk masyarakat luas. Dengan demikian, hal ini akan

memperluas akuntabilitas perusahaan, serta meninggalkan persepsi tradisional yang hanya mementingkan kekayaan pemegang saham, hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih luas dari hanya sekedar menyediakan uang kepada pemegang saham mereka (Rizk *et al.* 2008).

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Tilt (1999) dalam Uwigbe (2011) mengemukakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan sebagai mekanisme dimana perusahaan mengungkapkan aspek-aspek sosial dan lingkungan dari kegiatan perusahaan mereka kepada para pemangku kepentingan mereka. Hal ini juga dilihat sebagai proses mengkomunikasikan informasi (baik keuangan dan non-keuangan) mengenai sumber daya dan kinerja sosial dari entitas pelaporan seperti yang dikemukakan oleh Dutta dan Bose (2007), Carrol (1991) dalam Uwigbe (2011), lebih lanjut tanggung jawab sosial perusahaan juga dapat dilihat sebagai komitmen organisasi untuk beroperasi dengan cara yang ekonomis dan ramah lingkungan sambil mengakui kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan keuangan di Indonesia dianjurkan namun tidak disyaratkan, yaitu dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan yang menyatakan bahwa entitas dapat pula menyajikan laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi

industri di mana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting. Selain diatur dalam PSAK, pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan keuangan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 66 Ayat 2c yang menyatakan bahwa laporan tahunan harus memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Luas dan isi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan itu sendiri (Muttakin *et. al.*, 2015). Dimana tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengawasi tindakan perusahaan, serta menyeimbangkan kepentingan setiap pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yang dapat terpengaruh oleh tindakan perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006, dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha, direksi perusahaan juga diharuskan untuk memastikan terpenuhinya tanggung jawab sosial perusahaan (KNKG, 2006). Sehingga semakin baik kualitas tata kelola perusahaan maka tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin baik (Muttakin *et. al.*, 2015).

Selain tata kelola perusahaan, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan itu sendiri, yang

terdiri dari ukuran perusahaan, tingkat likuiditas, profitabilitas, tingkat *leverage*, kendala sosial yang dihadapi, umur perusahaan, profil perusahaan, struktur dewan, pemilik perusahaan dan negara perusahaan berdiri (Veronica, 2009 dalam Lucyanda dan Siagian, 2012). Sebagai contoh, perusahaan besar dan sukses yang memiliki sumber daya yang banyak akan memiliki komitmen lebih baik dalam tanggung jawab sosial perusahaan dan akan secara sukarela mengungkapkannya untuk memberikan kesan positif pada pasar (Muttakin *et al.*, 2015).

2.2 Model Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hubungan tata kelola dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan telah banyak diteliti di berbagai negara, seperti Malaysia (Ghazali, 2007; Amran dan Devi, 2008; Said *et al.*, 2009; Rahman *et al.*, 2011; Chek *et al.*, 2013; Haji, 2013; Said *et al.*, 2013), Australia (Mia dan Al-Mamun, 2011), Nigeria (Uwuigbe, 2011; Uwuigbe dan Egbibe, 2012; Ebiringa *et al.*, 2013), Banglades (Rouf, 2011; Muttakin *et al.*, 2015), Thailand (Sukcharoensin, 2012), Libia (Bayoud, 2012), Indonesia (Setyorini dan Ishak, 2012; Mulyadi dan Anwar, 2012), India (Muttakin dan Subramaniam, 2015), Kuwait (Al-Ajmi *et al.*, 2015) dan Palestina (Alkababji, 2014).

Ghazali (2007), Said *et al.* (2009), Haji (2013) melakukan penelitian mengenai tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial dan konsentrasi kepemilikan sebagai variabel independen. Dalam penelitian tersebut juga ditambahkan variabel lainnya, seperti ukuran

perusahaan (Ghazali, 2007; Said *et al.*, 2009; Haji, 2013), profitabilitas (Ghazali, 2007; Haji, 2013), tipe industri (Ghazali, 2007), ukuran dewan (Said *et al.*, 2009; Haji, 2013), direktur independen (Said *et al.*, 2009; Haji, 2013), *leverage* dan rapat dewan (Haji, 2013), kepemilikan asing, CEO dualitas dan komite audit independen (Said *et al.*, 2009).

Amran dan Devi (2008), Muttakin dan Subramaniam (2015) meneliti hubungan tata kelola perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing sebagai variabel independen. Dalam penelitian ini juga ditambahkan variabel lain seperti profitabilitas dan ukuran perusahaan (Amran dan Devi, 2008; Muttakin dan Subramaniam, 2015), jenis industri, keterikatan terhadap pemerintah dan keterikatan terhadap asing (Amran dan Devi, 2008), kepemilikan keluarga, direktur independen, dualitas CEO, *leverage*, umur perusahaan dan industri sensitif (Muttakin dan Subramaniam, 2015).

Al-Shubiri *et al.* (2012) serta Mulyadi dan Anwar (2012) meneliti pengaruh kepemilikan institusi terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian Mulyadi dan Anwar (2012) menambahkan variabel direktur independen dan profitabilitas sebagai variabel independen, sedangkan Al-Shubiri *et al.* (2012) menambahkan variabel independen seperti tingkat pertumbuhan perusahaan, dividen, ukuran perusahaan, umur perusahaan, kepemilikan individu, kepemilikan mayoritas dan tingkat *leverage*.

Said *et al.* (2013) dan Muttakin *et al.* (2015) meneliti pengaruh direktur wanita dan direktur independen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini juga menambahkan variabel ukuran perusahaan (Said *et*

al., 2013; Muttakin *et al.*, 2015), ukuran dewan, komisaris independen, jenis industri, umur komisaris, umur CEO, latar belakang ilmu keuangan komisaris, latar belakang ilmu keuangan CEO, latar belakang ilmu hukum komisaris, latar belakang ilmu hukum CEO, latar belakang ilmu keuangan dewan direksi serta latar belakang ilmu hukum dewan direksi (Said *et al.*, 2013), profitabilitas, kepemilikan keluarga, direktur asing, dualitas CEO, umur perusahaan dan *leverage* (Muttakin *et al.*, 2015).

Mia dan Al-Mamun (2011), Rahman *et al.* (2011), Chek *et al.* (2013), Juhmani (2014), Al-Ajmi *et al.* (2015) meneliti pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini menggunakan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* sebagai variabel independen. Penelitian tersebut juga menambahkan variabel independen lainnya seperti umur perusahaan (Rahman *et al.*, 2011; Juhmani, 2014; Al-Ajmi *et al.*, 2015), perubahan profitabilitas dan perubahan *leverage* (Mia dan Al-Mamun, 2011), kepemilikan pemerintah, jenis industri dan likuiditas (Al-Ajmi *et al.*, 2015).

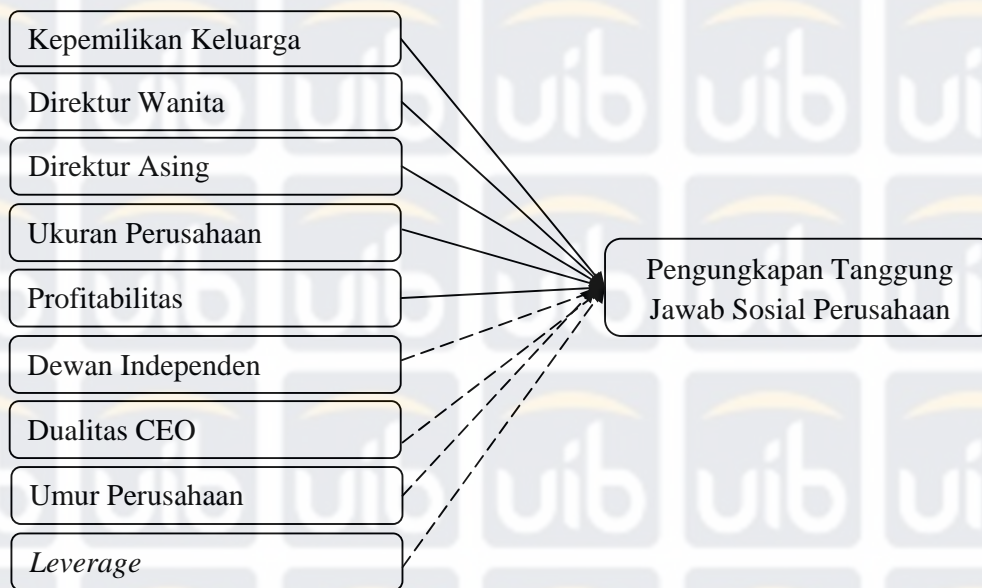
Khan (2010), Galani *et al.* (2011), Lungu *et al.* (2011), Uwuigbe (2011), Rouf (2011), Sufian (2012), Ebiringa *et al.* (2013), Soliman (2013) serta Alkababji (2014) meneliti pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini menggunakan variabel ukuran perusahaan dan profitabilitas sebagai variabel independen. Variabel lainnya yang ditambahkan dalam penelitian ini adalah umur perusahaan (Sufian, 2012; Soliman, 2013), ukuran kantor akuntan publik (Uwuigbe, 2011; Soliman, 2013), direktur independen (Khan, 2010; Rouf, 2011), struktur kepemimpinan dewan dan komite audit (Rouf, 2011), jenis sektor industri

(Alkababji, 2014), kenegaraan asal (Ebiringa *et al.*, 2013), direktur wanita, kepemilikan asing, *gearing* (Khan *et al.*, 2010), multinasional (Sufian, 2012), status terdaftar (Galani *et al.*, 2011).

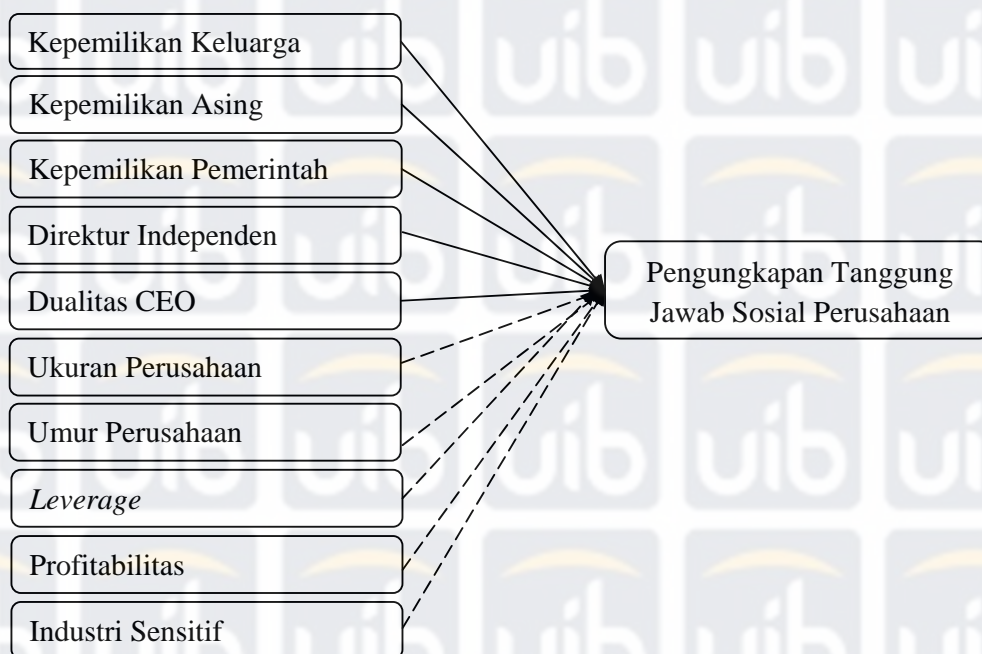
Naser dan Hassan (2013) serta Giannarakis (2014) meneliti pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan jenis industri. Naser dan Hassan (2013) menambahkan status ukuran kantor akuntan publik, lokasi kantor pusat dan struktur kepemilikan sebagai variabel independen, sedangkan Giannarakis (2014) menambahkan variabel rapat dewan, rata-rata umur anggota dewan, direktur wanita, ukuran perusahaan dan dualitas CEO sebagai variabel independen.

Penelitian mengenai pengaruh tata kelola dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan oleh Muttakin *et al.* (2015) di Banglades. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kepemilikan keluarga, direktur wanita, direktur asing, profitabilitas dan ukuran perusahaan, serta variabel kontrol seperti dewan independen, dualitas CEO, umur perusahaan dan *leverage*.

Pada tahun yang bersamaan penelitian mengenai pengaruh tata kelola dan karakteristik perusahaan juga dilakukan oleh Muttakin dan Subramaniam (2015) di India. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan keluarga, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, direktur independen dan dualitas CEO, penelitian ini juga menambahkan variabel kontrol seperti ukuran perusahaan, umur perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan industri sensitif. Model dari kedua penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Model penelitian pengaruh tata kelola dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sumber: Muttakin *et al.*, 2015.



Gambar 2 Model penelitian pengaruh tata kelola dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sumber: Muttakin dan Subramaniam 2015.

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Kepemilikan pemerintah adalah jumlah saham yang dimiliki pemerintah dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang dimiliki pemerintah lebih sensitif karena kepemilikan oleh pemerintah secara tidak langsung berarti kepemilikan oleh masyarakat luas, sehingga jenis perusahaan seperti ini akan lebih banyak melakukan kegiatan sosial dan melakukan pengungkapan kegiatan sosial untuk melegitimasi keberadaan mereka (Ghazali, 2007).

Ghazali (2007), Amran dan Devi (2008), Sukcharoensin (2012), Khan *et al.* (2012), Haji (2013) serta Muttakin dan Subramaniam (2015) menemukan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR. Di sisi lain, Al-Ajmi *et al.* (2015) menemukan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki hubungan signifikan negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan Alsaeed (2006), Huafang dan Jiangou (2007), Akrouf dan Othman (2013), serta Naser dan Hassan (2013) tidak menemukan adanya pengaruh signifikan antara kepemilikan pemerintah dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Kepemilikan asing adalah jumlah saham yang dimiliki investor asing. Investor asing dianggap lebih sadar dan peka terhadap meningkatnya ekspektasi bagi suatu bisnis untuk lebih bertanggung jawab sosial dalam masyarakat luas,

sehingga perusahaan dengan kepemilikan asing diperkirakan akan mengungkapkan informasi lebih lanjut termasuk informasi sosial dan lingkungan untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan (Khan *et al.*, 2012).

Haniffa dan Cooke (2005), Huafang dan Jiangou (2007), Khan (2010), Soliman *et al.* (2012), Khan, *et al.* (2012), Bowrin (2013) serta Muttakin dan Subramaniam (2015) membuktikan kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Disisi lain Amran dan Devi (2008), Said *et al.* (2009) serta Sufian dan Zahan (2013) tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara kepemilikan asing dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi. Investor institutional dinilai akan meningkatkan nilai perusahaan dan mengurangi informasi asimetri dalam perusahaan. Beberapa investor institutional berpendapat bahwa tanggung jawab sosial perusahaan berdampak secara material terhadap keuangan perusahaan, karena tanggung jawab sosial perusahaan dapat menciptakan keuntungan kompetitif dan berhubungan erat terhadap reputasi perusahaan dan harga saham, oleh karena itu perusahaan yang dimiliki oleh institusi akan senantiasa melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih baik (Clark dan Hebb, 2005 dalam Mulyadi dan Anwar, 2012).

Soliman *et al.* (2012), Abriyani *et al.* (2012) serta Uyar *et al.* (2013) menemukan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan Fauzi *et al.* (2007), Meryawati (2011), Lucyanda dan Siagian (2012), Hapsoro (2012), Mulyadi dan Anwar (2012) serta Al-Shubiri *et al.* (2012) tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.3.4 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Konsentrasi kepemilikan merupakan kepemilikan perusahaan oleh beberapa individu saja. Perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi memiliki akuntabilitas publik yang rendah, karena saham perusahaan dimiliki oleh beberapa individu saja, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan pengungkapan yang lebih untuk mengurangi informasi asimetri dalam perusahaan termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Ghazali, 2007).

Penelitian yang dilakukan Alsaed (2006), serta Said *et al.* (2009) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan Ghazali (2007), Khlif dan Souissi (2010), serta Haji (2013) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara konsentrasi kepemilikan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.3.5 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh para manajemen perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi dapat dianggap sebagai perusahaan tertutup, karena saham perusahaan dimiliki oleh pihak internal perusahaan itu sendiri, sehingga perusahaan akan kurang aktif dalam kegiatan sosial termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, karena akuntabilitas publik perusahaan relatif rendah (Ghazali, 2007).

Uwuigbe (2011) serta Haji (2013) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dilain sisi Ghazali (2007), Haron (2010), Khan *et al.* (2012) serta Soliman *et al.* (2012) menemukan hubungan signifikan negatif antara kepemilikan manajerial dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan Huafang dan Jianguo (2007), Rahman dan Widyasari (2008), Said *et al.* (2009), Abriyani *et al.* (2012), Lucyanda dan Siagian (2012) serta Sufian dan Zahan (2013) tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara kepemilikan manajerial dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.3.6 Pengaruh Direktur Wanita terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Direktur wanita adalah jumlah direktur wanita dalam komposisi dewan direksi. Secara umum, partisipasi wanita dalam dewan direksi dinilai

menguntungkan karena beberapa alasan, seperti memiliki tingkat pendidikan dan latar belakang pekerjaan yang luas, serta lebih sensitif dalam hal amal dan bermasyarakat, sehingga perusahaan dengan jumlah direktur wanita yang banyak dinilai akan lebih banyak melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Muttakin *et al.*, 2015).

Penelitian yang dilakukan Post *et al.* (2011), Bear *et al.* (2010) serta Vo dan Phan (2013) menemukan bahwa direktur wanita memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan dilain sisi Khan (2010), Said *et al.* (2013), Giannarakis (2014) serta Muttakin *et al.* (2015) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara direktur wanita dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.3.7 Pengaruh Direktur Asing terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Direktur asing merupakan jumlah direktur asing dalam susunan dewan direksi. Dengan memiliki direktur asing, perusahaan dinilai memiliki komitmen yang lebih tinggi mengenai transparansi dan pengawasan perusahaan serta meningkatkan reputasi perusahaan dalam pasar modal, selain itu direktur asing yang diharapkan mampu menggunakan koneksi internasionalnya untuk meningkatkan perencanaan strategi serta pasar ekspor perusahaan akan senantiasa memamerkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaannya, sehingga perusahaan dengan proporsi direktur asing yang tinggi akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang tinggi (Muttakin *et al.*, 2015).

Penelitian Zahra dan Filatotchev (2004), Huafang dan Jiangou (2007) serta Muttakin *et al.* (2015) membuktikan hubungan signifikan positif antara direktur asing dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan dilain sisi Baroko dan Brown (2008) serta Elsakit dan Worthington (2014) tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara direktur asing dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.3.8 Pengaruh Direktur Independen terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Direktur independen merupakan proporsi direktur independen dalam susunan dewan direksi perusahaan. Direktur independen ditugaskan untuk melindungi kepentingan pemegang saham, seperti menjaga nama baik perusahaan dan memastikan perusahaan telah dijalankan dengan baik oleh para manajemen, tidak terlibat dalam kegiatan sosial akan menyebabkan nama baik perusahaan dan kepentingan pemegang saham terganggu, sehingga semakin banyak direktur independen akan mengakibatkan keterlibatan dalam kegiatan sosial dan pengungkapannya lebih tinggi demi menjaga nama baik perusahaan dan kepentingan pemegang saham (Said *et al.*, 2009)

Penelitian Rouf (2011), Khan *et al.* (2012), Das *et al.* (2015), serta Muttakin dan Subramaniam (2015) menemukan hubungan signifikan positif antara direktur independen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan Haniffah dan Cooke (2002), Said *et al.* (2009), Abdullah *et al.* (2011), Mulyadi dan Anwar (2012), Sallehuddin (2013) serta Haji (2013)

tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara direktur independen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.3.9 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Komisaris independen merupakan proporsi komisaris independen dalam susunan dewan komisaris perusahaan. Komisaris merupakan pengawas terhadap kinerja para direksi agar berjalan sesuai dengan keinginan para pemegang saham, termasuk dalam mengurangi informasi asimetri dalam perusahaan dengan cara melakukan pengungkapan sukarela, sehingga semakin banyak jumlah komisaris independen dalam perusahaan akan meningkatkan jumlah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Said *et al.*, 2009).

Penelitian yang dilakukan Abriyani *et al.* (2012) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan Said *et al.* (2009), Lucyanda dan Siagian (2012), serta Hapsoro (2012) tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara komisaris independen dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.3.10 Pengaruh Komite Audit Independen terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Komite audit independen merupakan proporsi anggota komite audit independen dalam susunan anggota komite audit perusahaan. Komite audit bertugas untuk melakukan tindakan pemeriksaan terhadap informasi yang

dihasilkan perusahaan agar terbebas dari segala informasi yang dapat menyesatkan pemegang saham, termasuk pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan untuk mengurangi informasi asimetri dan meningkatkan nilai perusahaan, sehingga semakin banyak jumlah anggota independen dalam susunan komite audit akan mengurangi biaya agensi dan meningkatkan pengendalian internal perusahaan yang akan menghasilkan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih baik (Forker, 1992 dalam Said *et al.* 2009).

Penelitian yang dilakukan Ho dan Wong (2001), Bliss dan Balachanran (2003), serta Said *et al.* (2009) membuktikan hubungan signifikan positif antara komite audit independen dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.3.11 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perusahaan yang besar dan memiliki sumber daya yang banyak cenderung akan memiliki komitmen yang lebih baik akan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan akan dengan sukarela mengungkapkan kegiatan mereka untuk mengirimkan sinyal positif kepada pasar (Muttakin *et al.* 2015). Perusahaan yang besar juga lebih diperhatikan oleh banyak pemangku kepentingan, dan mereka memiliki kemampuan untuk mengeluarkan biaya yang lebih untuk meningkatkan pengungkapan (Al-Ajmi *et al.* 2015).

Penelitian Huafang dan Jiangou (2007), Amran dan Devi (2008), Khan (2010), Mia dan Al-Mamun (2011), Uwuigbe (2011), AL-Shubiri *et al.* (2012), Bayoud *et al.* (2012), Lucyanda dan Siagian (2012), Soliman *et al.* (2012), Setyorini dan Ishak (2012), Nasser dan Hassan (2013), Alkababji (2014),

Giannarakis (2014), Muttakin *et al.* (2015) membuktikan hubungan signifikan positif antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan Roberts (1992), Rouf (2011), Ebiringa *et al.* (2013), Juhmani (2014), Kansal *et al.* (2014) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.3.12 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Profitabilitas merupakan salah satu faktor pengukur terhadap kinerja manajemen perusahaan. Profitabilitas juga merupakan salah satu faktor yang memungkinkan manajemen untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan lebih fleksibel, semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan karena perusahaan tertarik untuk mengungkapkan bagaimana mereka memperoleh profit yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lainnya (Mulyadi dan Anwar, 2012).

Penelitian yang dilakukan Rouf (2011), Uwuigbe (2011), Mulyadi dan Anwar (2012), Lucyanda dan Siagian (2012), Soliman *et al.* (2012), Ebiringa *et al.* (2013), Al-ajmi *et al.* (2015) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, Naser dan Hassan (2013) membuktikan hubungan signifikan negatif, sedangkan Ghazali (2007), Amran dan Devi (2008), Mia dan Al-mamun (2011), Sufian (2012), Raman *et al.* (2011), Chek *et al.* (2013), Giannarakis (2014), Juhmani

(2014) serta Alkababji (2014) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara profitabilitas dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.3.13 Pengaruh *Leverage* terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Leverage merupakan tingkat penggunaan utang dalam mendanai kegiatan usaha perusahaan. Semakin tinggi tingkat *leverage* berarti tingkat kewajiban perusahaan terhadap pihak ketiga semakin meningkat dan mengakibatkan perusahaan lebih diawasi oleh para pemangku kepentingan terutama kreditur, bank dan investor, sehingga perusahaan akan melakukan pengungkapan informasi yang lebih banyak kepada para pemangku kepentingan tersebut dan juga publik untuk meyakinkan mereka bahwa perusahaan tidak melanggar ketentuan dalam perjanjian utang (Mia dan Al-Mamun, 2011).

Penelitian Al-Shubari *et al.* (2012), Haji (2013), Chek *et al.* (2013), Juhmani (2014), Muttakin dan Subramaniam (2015) serta Muttakin *et al.* (2015) menemukan hubungan signifikan positif antara *leverage* dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sukcharoensin (2012) serta Uwuigbe dan Egbide (2012) menemukan hubungan signifikan negatif antara *leverage* dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan Mia dan Al-Mamun (2011), Rahman *et al.* (2011), Setyorini dan Ishak (2012), Abriyani *et al.* (2012), Chek *et al.* (2013), Naser dan Hassan (2013), Giannarakis (2014) serta Al-Ajmi *et al.* (2015) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara tingkat *leverage* dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.3.14 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

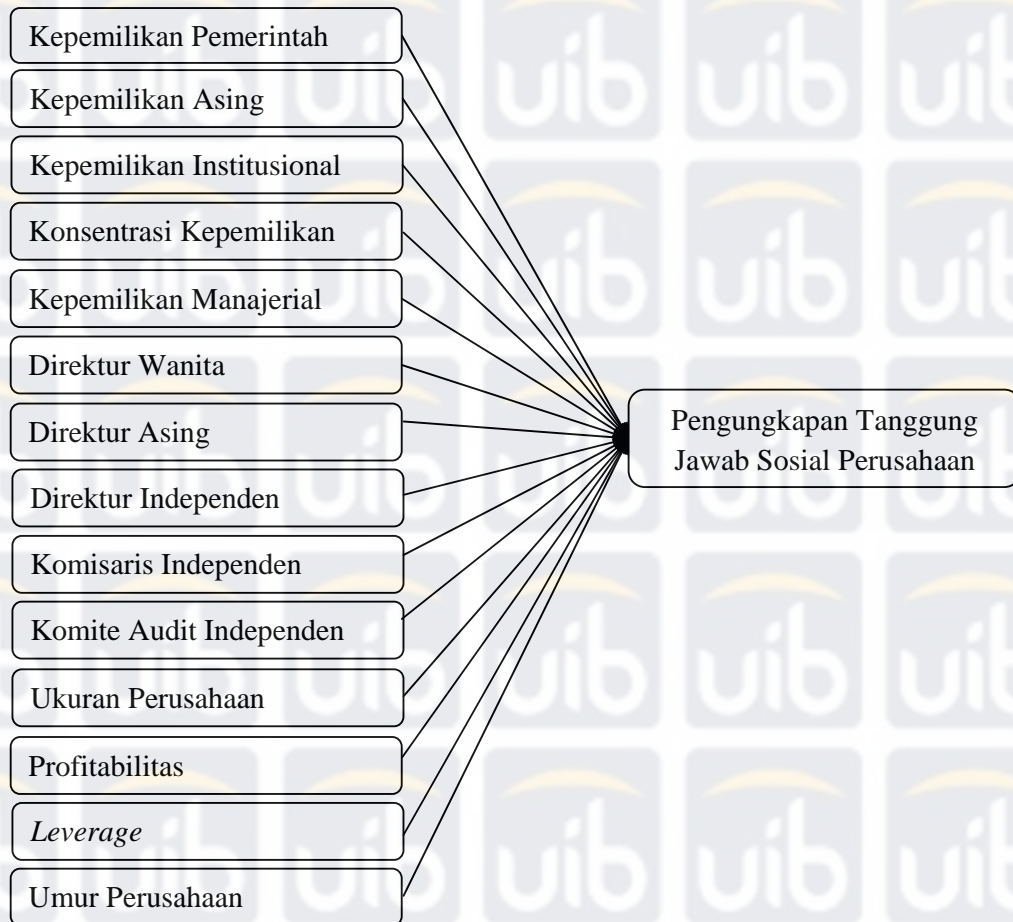
Umur perusahaan menandakan lamanya perusahaan telah melakukan kegiatan usahanya. Berdasarkan teori legitimasi keberadaan sosial perusahaan tergantung pada penerimaan masyarakat dimana perusahaan beroperasi, karena perusahaan dapat terpengaruh dan memiliki pengaruh dalam masyarakat maka legitimasi dapat diasumsikan sebagai sumber daya yang penting untuk keberlangsung hidup perusahaan, sehingga perusahaan yang lebih tua cenderung memiliki reputasi dan keterlibatan terhadap tanggung jawab sosial yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang baru beroperasi (Juhmani, 2014).

Penelitian yang dilakukan Robert (1992), Bayoud *et al.* (2012), Al-shubiri *et al.* (2012), Soliman *et al.* (2012), Muttakin dan Subramaniam (2015), serta Muttakin *et al.* (2015) menemukan hubungan signifikan positif antara umur perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan Rahman *et al.* (2011), Sukcharoensin (2012), Juhmani (2014), serta Al-ajmi *et al.* (2015) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara umur perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.4 Model Penelitian

Variabel dependen yang ditetapkan dalam model penelitian ini adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Variabel independen yang ditetapkan dalam model penelitian ini adalah kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, direktur wanita, direktur asing, direktur independen,

komisaris independen, komite audit independen, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan umur perusahaan. Model penelitian tersebut dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini.



Gambar 3 Model Analisis Pengaruh Tata Kelola dan Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sumber: Peneliti, 2016.

2.5 Hipotesis

Dari model penelitian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

H₂: Kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

H₃: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

H₄: Konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

H₅: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

H₆: Direktur wanita berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

H₇: Direktur asing berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

H₈: Direktur independen berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

H₉: Komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

H₁₀: Komite audit independen berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

H₁₁: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

H₁₂: Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

H₁₃: *Leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

H₁₄: Umur perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.